

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Sukirno, 2014).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena di dalamnya terdiri dari banyak dinamika, baik secara mikro maupun secara makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Suatu negara akan dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah dalam pembangunan. Pertama,

jumlah kemiskinan yang terus meningkat, kedua, distribusi pendapatan yang semakin memburuk, ketiga, lapangan pekerjaan yang kurang variatif sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja. (Kuncoro, 2014).

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan Provinsi Jambi salah satunya di Kota Sungai Penuh agar kesenjangan upaya pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tujuan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas padahal diakibatkan hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan. Menurut Todaro (2014) di negara-negara berkembang masih banyak ditemukan kemiskinan yang mencolok, meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir.

Kota Sungai Penuh yang baru pemekaran dari Kabupaten Kerinci sehingga pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pembangunan ekonomi belum dapat keluar dari masalah kemiskinan disebabkan karena perekonomian masih tergantung pada Kabupaten Kerinci dan di bantu oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Menurut Basri dan Munandar (2009) sesungguhnya masalah ekonomi apapun dasarnya dapat diatasi apabila mengetahui akar permasalahan untuk segera diatasi. Kemiskinan timbul bisa karena faktor individual, kultural dan struktural. Sehingga produktivitas masyarakat secara umum relatif masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Faktor inilah menjadi penyebab utama banyaknya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah Tingkat Kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yaitu:

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sarolangun	8,87	8,73	8,45	8,42	8,87
Batanghari	10,33	10,23	9,75	9,65	10,05
Muaro Jambi	4,37	4,05	3,83	3,83	4,53
Tanjung Jabung Timur	12,58	12,38	11,54	10,95	11,39
Tanjung Jabung Barat	11,32	11,10	10,56	10,29	10,75
Tebo	6,79	6,58	6,47	6,26	6,68
Bungo	5,82	5,78	5,60	5,80	6,23
Kota Jambi	8,84	8,49	8,12	8,27	9,02
<b>Kota Sungai Penuh</b>	<b>2,78</b>	<b>2,76</b>	<b>2,81</b>	<b>3,03</b>	<b>3,41</b>
Kerinci	7,45	7,07	7,13	7,30	7,58
Merangin	9,43	8,88	8,48	8,63	9,11

**Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2023**

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari pokok permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Kemiskinan menjadi masalah mendasar bagi semua daerah tidak terkecuali daerah Kota Sungai Penuh. Masalah kemiskinan tetap menjadi sasaran utama dalam program pembangunan disamping masalah-masalah lainnya. Program pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Kota Sungai Penuh mulai dari pemberian subsidi langsung bagi masyarakat kurang mampu dan juga dengan berupaya meningkatkan iklim investasi sehingga mampu mendorong faktor lain seperti

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu dengan banyak masuknya investasi akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Arsyad, 2012).

Pembangunan manusia sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu terdiri dari aspek sumber daya manusia yang rendah, lemahnya perekonomian, kesempatan kerja yang rendah, dan tingginya ketimpangan pendapatan setiap daerah (Jhingan, 2012). Jika ditinjau dari perpektif ekonomi, jika pembangunan ekonomi di suatu daerah tersebut baik akan menghasilkan sumber daya manusia baik jika sebaliknya pembangunan ekonomi buruk maka akan menciptakan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Berikut merupakan data faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh:

**Tabel 1.2 Faktor-faktor mempengaruhi kemiskinan di Kota Sungai Penuh**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Pengangguran Terbuka (Persen)	Ketimpangan Pendapatan (Poin)
2017	88.918	6,02	73,75	4,14	0,32
2018	89.944	4,88	74,67	5,13	0,30
2019	90.910	5,01	75,36	4,00	0,33
2020	96.610	-0,16	75,42	5,56	0,31
2021	97.770	3,67	75,70	3,00	0,31
2022	99.233	4,45	76,17	2,49	0,29

**Sumber : BPS Kota Sungai Penuh, Tahun 2023**

Berdasarkan tabel 1.2 ada banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Sungai Penuh, salah satu diantaranya adalah jumlah penduduk jumlah penduduk di Kota Sungai Penuh terus meningkat pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 88.918 jiwa meningkat pada tahun 2022 yaitu 99.233 jiwa, hal ini sesuai dengan teori Malthus, dalam teorinya mengibaratkan laju pertumbuhan

penduduk sebagai deret ukur, dan laju pertumbuhan pangan sebagai deret hitung, yang berarti bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan. Sehingga, untuk jangka panjang hal ini akan mendatangkan malapetaka, yaitu krisis sumber daya alam yang pada akhirnya mendorong tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kuncoro (2014) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Hal ini menjadi persoalan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Selain jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sebesar 6,02 persen meningkat pada tahun 2022 mencapai 4,45 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disinyalir berdampak pada penurunan angka kemiskinan itu sendiri. Menurut Tan (2022) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan suatu Negara atau daerah dalam jangka panjang, dalam penghitungannya selalu dihitung dalam satu tahun. Dari pengertian tersebut, ada tiga kunci yaitu : (1), proses berarti pertumbuhan ekonomi dicapai melalui system perencanaan yang benar, memerlukan waktu dan mengikuti pola pertumbuhan normal; (2), indikator yang digunakan adalah pendapatan yang disebut dengan PDB atau PDRB; dan (3), keberhasilan dilihat dalam jangka panjang, menunjukkan dimensi waktu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil pertahun adalah suatu yang rasional, sebagai akibat banyak faktor yang mempengaruhinya tetapi dalam jangka panjang

harus menunjukkan kecenderungan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Di Kota Sungai Penuh IPM pada tahun 2017 sebesar 73,75 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 76,17 persen, maka IPM menjadi tolak ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat, peningkatan IPM masih cukup rendah hal ini akan berdampak pada kemiskinan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Makinw, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan selanjutnya adalah tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat pada makin buruknya masalah kemiskinan. Menurut Sukirno (2014), efek buruk dari

pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Setiap orang yang menganggur akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak memiliki pendapatan. Keadaan ini akan meningkatkan kecenderungan mereka untuk terjebak dalam kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di kota Sungai Penuh cenderung meningkat pada tahun 2017 sebesar 4,14 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 2,49 persen, hal ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan cukup drastis akan tetapi pada tahun yang sama tingkat kemiskinan meningkat di Kota Sungai Penuh.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Menurut Ranis (2004), distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi berdampak kuat pada pembangunan manusia. Ketimpangan pendapatan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2017 sebesar 0,32 persen kemudian pada tahun 2022 sebesar 0,29 persen. Dengan adanya peningkatan pendapatan, penduduk miskin memiliki modal untuk memperbaiki kualitas hidup, baik kesehatan, maupun pendidikan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, manfaat dari pertumbuhan ekonomi juga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga iklim ekonomi dapat bertumbuh dengan baik. Secara umum indeks gini Kota Sungai Penuh berada dibawah 0,4 ( $GR < 0,4$ ), hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Sungai Penuh

dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Sebagai daerah berkembang peningkatan ini merupakan hal biasa namun tetap harus diwaspadai agar tidak berlanjut peningkatannya dimasa mendatang. Untuk itu tentunya perlu diperhatikan aspek pendapatan masyarakat Kota Sungai Penuh agar lebih merata dengan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas masyarakat.

Perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jambi tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang lebih baik. Terlebih lagi dengan adanya pandemi covid-19 beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan meningkat di Kota Sungai Penuh.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jmabi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh memperlihatkan kecenderungan terus menurun atau masih dibawah rata-rata Provins Jambi terkhusus pada tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19, akan tetapi tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh juga ikut menurun. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Kota Sungai Penuh sebagai objek penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota Sungai Penuh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan, jumlah penduduk,



pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di Kota Sungai Penuh ?

2. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan, terhadap kemiskinan di Kota Sungai Penuh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan, terhadap kemiskinan di Kota Sungai Penuh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Akademik**

Penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Konsep yang berkaitan dengan kemiskinan.

### **2. Secara teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu ekonomi makro dan ekonomi pembangunan bahan masukkan penelitian yang sejenis.

### **3. Secara praktis**

Penelitian ini bermanfaat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kemiskinan, dan bagaimana cara untuk menguranginya di dalam penelitian.